

LIFE SKILLS EDUCATION THROUGH NON-FORMAL EDUCATION FOR PEOPLE WITH PHYSICAL DISABILITIES

SPEKTRUM

Jurnal Pendidikan Luar Sekolah

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi>

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

Sumatera Barat, Indonesia

Volume 10, Nomor 2, Mei 2022

DOI: 10.24036/spektrumpls.v10i2.116728

Mahfuzi Irwan^{1,2}, Aisyah Anggreni¹, Jihan Sunita¹, Herman Suhdi¹

¹Jurusan Pendidikan Masyarakat, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan

²aisyahanggreni346@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to identify and identify life skills education through non-formal education for persons with physical disabilities. Individuals who have physical limitations are called persons with physical disabilities. In the social environment, society tends to give negative stigma to people with physical disabilities and other problems that are in the spotlight are the low participation and provision of job opportunities for people with disabilities in obtaining work. This study used qualitative research methods. This research is sourced from secondary data obtained from documents, and journals related and in line with physical disabilities and life skills education for physical disabilities. The result of this literature review is that empowerment of disabled groups must be carried out to increase participation in various fields of social life with adequate and relevant work skills. Skill enhancement is provided to gain accessibility for persons with disabilities, one of which is through non-formal education programs, namely life skills education. Vocational rehabilitation as a form of life skills education through non-formal education is carried out by providing services in the form of skills training activities that aim to cultivate, develop and increase the potential possessed by persons with disabilities, especially persons with physical disabilities.

Keywords: Life Skills Education, Physical Disability, Vocational Rehabilitation

PENDAHULUAN

Kata “penyandang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu, kata disabilitas berasal dari kata serapan bahasa Inggris *disability* (jamak: *disabilities*) dari akar kata *dis-* yang bermakna hilang dan *-ability* kemampuan, sehingga disabilitas bermakna hilangnya maupun berkurangnya kemampuan seseorang baik secara fisik-fisiologis maupun mental-psikologis. Hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain, disebabkan oleh faktor keturunan, faktor usia maupun akibat kecelakaan. Penggunaan kata “disabilitas” sebelumnya lebih di kenal dengan sebutan difabel atau penyandang “cacat”. Individu yang memiliki keterbatasan fisik disebut dengan penyandang disabilitas fisik. Menurut Suparno (2009), disabilitas fisik adalah kondisi seseorang yang mengalami kelainan fisik, yang mencakup kelainan anggota tubuh maupun yang mengalami kelainan gerak. Penyandang disabilitas memiliki permasalahan tekanan dari lingkungan sosial dan mengalami keterbatasan karna cara pandang yang salah dari masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Di lingkungan sosial, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif daripada memberikan kesempatan, terlebih untuk memberikan semangat dalam menjalani hidup, sehingga penyandang disabilitas seringkali mengalami diskriminasi.

Permasalahan yang sangat menonjol dari penyandang disabilitas ini adalah rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di sektor kesempatan kerja. Berdasarkan Siregar dkk (2021), angka pengangguran penduduk dengan disabilitas (*people with disability/ PWD*) (3,99%) lebih rendah dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (*people without disabilities/ PWOD*) (7,26%). Meskipun demikian, rata-rata angka partisipasi tenaga kerja PWD lebih rendah (44,55%) dibandingkan dengan PWOD (70,01%) serta rata-rata upah yang diterima oleh PWD lebih rendah (Rp 1,3 juta) dibandingkan dengan PWOD (1,8 juta). Selain itu, PWD yang bekerja di sektor formal juga

tercatat lebih rendah (30,49%) dibandingkan dengan PWOD (48,27%). Rata-rata jumlah jam kerja pun juga lebih rendah oleh kelompok PWD dibandingkan dengan PWOD.

Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kesulitan dalam mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, selain itu kurangnya pemahaman pemberi kerja akan pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas menyebabkan pemberi kerja menilai sebelah mata dan menyudutkan penyandang disabilitas dan masih banyak lagi hal-hal lain yang melatarbelakangi redahnya partisipasi penyandang disabilitas fisik dalam kesempatan kerja. Sering sekali setelah tamat hanya berada di rumah dan ataupun bekerja hanya mampu sebentar saja karna sulit untuk menyesuaikan diri ditempat kerjanya. Keterbatasan pada penyandang disabilitas juga mengakibatkan kesulitan dalam mengakses pekerjaan karena dianggap kurang produktif. Kurangnya kepercayaan diri, tidak memiliki kecakapan hidup maupun keterampilan mengakibatkan penyandang disabilitas kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya terlebih saat mulai berada tengah masyarakat. Keberadaan penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat saat ini diketahui bahwa masih banyak yang kondisi hidupnya jauh dari kemandirian baik sosial maupun ekonomi. Penyandang disabilitas tidak mungkin selalu bergantung pada orang lain, karena pada kenyataannya di lingkungan sosial individu selalu dituntut untuk dapat hidup mandiri karena hal tersebut kelak akan menjadi hal penting dalam menjalani kehidupan sosialnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut para penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas atau pendamping untuk membantu segala permasalahannya. Dari keterbatasan fisik para penyandang disabilitas yang masing-masingnya memiliki potensi, kemampuan, keterampilan, cita-cita layaknya anak-anak normal lainnya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah memberdayakan serta meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan bagi para penyandang disabilitas. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bagian Kelima Pendidikan Nonformal Pasal 26 ayat (3) menyebutkan bahwa "Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik." Guna mewujudkan visi visi Ditjen PNFI yakni: "terwujudnya manusia pembelajar sepanjang hayat", pendidikan nonformal dan informal mempunyai misi untuk memberikan layanan pendidikan nonformal dan informal yang merata, bermutu, dan menjangkau sasaran yang tak terlayani dengan salah satunya menyelenggarakan pendidikan kecakapan hidup bagi siapapun yang membutuhkan. Melalui pendidikan nonformal, diberikan upaya pengembangan model keterampilan pelatihan kecakapan hidup bagi masyarakat penyandang cacat yang sangat penting dan dibutuhkan, karena memberikan peluang dalam lapangan pekerjaan.

Pemberdayaan kelompok disabilitas, dengan demikian, haruslah dilakukan sesuai dengan memodifikasi lingkungan sehingga hambatan-hambatan fisik maupun sosial tersebut menjadi minimal. Tantangan selanjutnya adalah melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional mereka. Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Dalam hal ini maka akan memecahkan ketergantungan yang dialami para penyandang disabilitas, dan meningkatkan derajat keberfungsian sosial dari individu-individu dalam masyarakat secara umum. Ketika penyandang disabilitas tidak bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk menjalankan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif menjadi semakin terbuka. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai aktifitas produktif akan secara langsung mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi (Syobah, 2018).

Dengan demikian, pendidikan kecakapan hidup dapat membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil sehat dan mandiri. Pendidikan kecakapan hidup adalah salah satu kontribusi pendidikan nonformal dalam mengatasi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Dalam hal ini penyandang disabilitas memang memiliki angka pengangguran yang lebih rendah (3,99%) dibandingkan dengan penduduk bukan penyandang disabilitas (7,26%). Akan tetapi, rata-rata angka

partisipasi tenaga kerja PWD lebih rendah (44,55%) dibandingkan dengan PWOD (70,01%). Dalam implementasinya para sukarelawan, tutor, fasilitator dapat berperan sebagai agen perubahan dengan membantu masyarakat untuk mengembangkan kecakapan hidup yang begitu dibutuhkan oleh mereka. Melalui pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) dapat mengantarkan manusia-manusia Indonesia memasuki era globalisasi dengan kemampuan kompetitif yang tinggi. Program pendidikan *life skill* adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi dan industri yang ada di masyarakat. Adanya pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) bagi penyandang disabilitas semakin menjadi penting. Pada akhirnya harus menghantarkan kemandirian hidup penyandang disabilitas di masyarakat. Diharapkan bagi penyandang disabilitas juga mampu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif dan berkepribadian. Penyandang disabilitas memang perlu untuk diajarkan kecakapan hidup (*life skill*) sejak dini untuk menunjang kehidupannya setelah lulus dari sekolah luar biasa, dan tentunya dukungan dari orang tua juga sangat berpengaruh terhadap anak untuk dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi strategi yang digunakan melalui pendidikan kecakapan hidup pada pendidikan nonformal dalam menyelesaikan masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Oleh karena itu, perlu diadakan pengembangan strategi baru yang lebih tepat. Komponen masyarakat, pemerintah, dan penyandang disabilitas fisik sangat berpengaruh terhadap pengembangan pendidikan kecakapan hidup ini, salah satu usaha yang dilakukan adalah program dari Kementerian Sosial yang ditujukan untuk penyandang disabilitas. Program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial menjadi cara yang dapat diharapkan untuk menyelenggarakan solusi menuntaskan masalah aksesibilitas dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Berhubungan dengan tujuan dan latar belakang di atas maka kajian masalah dalam pembahasan tulisan ini adalah pendidikan kecakapan hidup melalui pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas fisik.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Sutrisno, 2000). Penelitian ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (Mantra, 2008). Menggunakan metode kualitatif dirasa sangat sesuai karena mampu menjawab tujuan penelitian, yakni mengetahui dan mengidentifikasi program pendidikan kecakapan hidup melalui pendidikan nonformal bagi penyandang disabilitas fisik, dimana dalam hal ini strategi yang digunakan dalam penelitian adalah fenomenologi, karena penelitian terkait fenomena sosial. Fenomena sosial bukan berada di luar individu-individu, tetapi berada dalam benak (interpretasi) individu-individu (Poerwandari, 2011). Fenomenologi merupakan strategi penelitian di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2010). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengidentifikasi pendidikan kecakapan hidup bagi kaum penyandang disabilitas fisik yang memiliki stigma negatif dari masyarakat dan aksesibilitas yang rendah dalam sektor kesempatan kerja.

Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud data sekunder yang diperoleh dari suatu dokumen, jurnal-jurnal yang berkaitan dan selaras dengan disabilitas fisik serta pendidikan kecakapan hidup bagi disabilitas fisik. Validitas data menggunakan triangulasi data, yaitu dengan cara memeriksa kebenaran data dengan menggunakan perbandingan antara data dari sumber data yang satu dengan sumber data yang lain, sehingga keabsahan dan kebenaran data akan diuji oleh sumber data yang berbeda. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data (Noeng, 1998). Isi yang digunakan untuk menelaah isi dari suatu dokumen, jurnal ilmiah, dan data-data

PEMBAHASAN

Permasalahan Penyandang Disabilitas Fisik

Rendahnya Partisipasi Penyandang Disabilitas Fisik di Sektor Kesempatan Kerja

Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan kepada para penyandang cacat fisik untuk mencapai pekerjaan. Pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang dimaksud penyandang disabilitas adalah: “termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya”. Partisipasi yang dimaksud adalah keikutsertaan dan pelibatan penyandang disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Pemberian kesempatan kerja berupa kemudahan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan tergolong masih rendah.

Pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih belum diperoleh, hal tersebut dapat dilihat dari masih sulitnya penyandang disabilitas untuk bekerja di dunia usaha yang ada di masyarakat. Termasuk dalam memperoleh pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan pun, penyandang disabilitas masih sulit dalam mendapatkan kesempatan tersebut. Permasalahan terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan rata-rata bersumber dari pemberi kerja yang menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang lemah, sakit, dan memerlukan bantuan sosial. Kondisi penyandang disabilitas dianggap tidak cocok untuk bekerja karena pekerjaan yang dilakukan akan menghambat kondisi kedisabilitasannya mereka. Selain itu, kurangnya pemahaman pemberi kerja akan pendidikan yang ditempuh penyandang disabilitas menyebabkan pemberi kerja menilai sebelah mata dan menyudutkan penyandang disabilitas. Faktor lainnya pemberi kerja beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cocok bekerja di perusahaan mereka karena tidak memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pekerjaan tanpa memandang suku, ras, dan agama perlu diimplementasikan terhadap penyandang disabilitas. Jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja/pengangguran lebih banyak daripada yang bekerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam dunia kerja. Rendahnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dapat dilihat berdasarkan pengaturan undang-undang, pemahaman penyedia kerja terhadap kemampuan bekerja penyandang disabilitas, kebijakan pemerintah yang telah tersedia, serta pandangan penyandang disabilitas dalam melihat aksesibilitas tersebut. Pentingnya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan berdampak terhadap tingginya angka serapan penyandang disabilitas di dunia kerja sehingga masalah aksesibilitas penyandang disabilitas perlu diselesaikan secara optimal oleh pemerintah dan masyarakat. Semakin mudah akses disabilitas dalam memperoleh pekerjaan maka tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas menjadi lebih baik dan turut merasakan pemerataan pembangunan daerah.

Kondisi Kultural Masyarakat yang Tidak Kondusif bagi Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik

Stigma cacat atau difabel di masyarakat sudah terlanjur melekat atau menjadi label pada diri penyandang disabilitas, sehingga kehidupan mereka jauh dari kata sejahtera (*welfare*). Keberadaan penyandang disabilitas kurang diperhatikan dilihat dari pemberdayaan serta anggapan dari orang-orang sekitar, bahkan masih sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat karena kekurangan yang ia punya. Akibatnya para penyandang disabilitas sering mendapat perlakuan yang berbeda dengan

anak pada umumnya. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Stigma negatif yang diterima penyandang disabilitas fisik tersebut diakibatkan dari adanya pemahaman negatif tentang disabilitas dan penyandang disabilitas antara lain berakar dari pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas. Sejarah telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang penampilan atau tubuhnya kelihatan atau dipandang sebagai 'berbeda' dari yang dianggap oleh masyarakat sebagai normatif, sebagai normalitas, akan dianggap sebagai yang tidak diinginkan/*not desirable* dan tidak dapat diterima/*not acceptable* sebagai bagian dari komunitas (Couser, 2009; Rothman, 2003).

Pelabelan negatif sebagai 'berbeda dari yang diterima sebagai normalitas' adalah suatu proses stigmatisasi. Paham ini menganggap disabilitas sebagai abnormalitas dan dampaknya seringkali berujung pada anggapan bahwa kaum disabilitas adalah kaum abnormal dan obyek yang layak dikasihani, diberi donasi, serta tidak dapat mandiri. Sikap dan perilaku diskriminatif akan muncul bila stigmatisasi/ pelabelan negatif tersebut berlanjut dengan pembedaan lebih lanjut antara lain berupa pemisahan secara paksa dan bersifat membatasi/*segregation*, atau pengeluaran karena dianggap bukan bagian integral dan/atau setara/*social exclusion*, atau dinilai kurang/tidak bernilai secara sosial/*socially devalued* (Shapiro, 2000; Stoll, 2011; Wolfensberger, 1992). Haidar dalam Dhairyya & Herawati (2019) mengemukakan bahwa stigma pada disabilitas muncul karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas dan kuatnya paham di masyarakat mengenai pemikiran tradisional, yaitu cenderung mengaitkan disabilitas dengan hal-hal magis dan negatif. Misal anggapan masyarakat bahwa disabilitas merupakan akibat dari kutukan turun-temurun. Kedua pendapat diatas menegaskan betapa stigma pada penyandang disabilitas sangat langgeng di masyarakat.

Beberapa penelitian menemukan bahwa stigma sosial pada disabilitas berdampak serius pada derajat kesejahteraan dan keberdayaan mereka. (Rahman, 2008) menemukan bahwa implikasi stigma pada kelompok disabilitas berdampak pada perkembangan psikologis kaum disabilitas, dan juga terbatasnya pemenuhan akses-akses sosial mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Anggapan umum bahwa para disabilitas tidak mampu bekerja secara maksimal telah membatasi bahkan menutup akses para disabilitas pada kesempatan memperoleh pendidikan.

Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Bartin & Wisroni, 2019). Tujuan akhir dari pendidikan kecakapan hidup tersebut adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan produktivitas hidup untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan dan produktivitas hidup masyarakat marginal dalam meningkatkan kemampuan sosial ekonominya (Jalius, Sunarti, Azizah, & Gusmanti, 2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas erat hubungannya dengan layanan pendidikan kecakapan hidup atau *life skills*. Ilmu mengenai kecakapan ini sangatlah penting, karena merupakan pencampuran atau pertemuan antara berbagai ilmu pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bentuk pendidikan kecakapan hidup (*life skill*) dimana menurut Depdiknas bahwa kecakapan hidup (*life skill*) dapat diartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang (penyandang disabilitas) untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya (Noor, 2015).

Zein (2017) mengemukakan bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi orang yang membutuhkan untuk mendapatkan layanan yang relevan. Penyandang disabilitas yang sudah mencapai usia dewasa perlu mendapatkan akses ke dunia pekerjaan agar dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Kecakapan hidup bagi penyandang cacat adalah serangkaian upaya yang berencana, sistematis, terpadu, terarah, sungguh-sungguh dan berkesinambungan untuk menggali, membangun menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki para penyandang cacat (Anwar, 2012; Depdiknas, 2002). Oleh karena itu, sesungguhnya transformasi nilai-nilai budaya masyarakat di

Indonesia yang beragam perlu dipertimbangkan dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai aspek kehidupan yang dimiliki oleh setiap individu yang bisa dikembangkan untuk mencapai kualitas hidup dalam berbangsa dan bernegara agar tercapai kesejahteraan yang hakiki, melalui pelatihan kecakapan hidup. Dengan kata lain dalam konteks pemberdayaan para penyandang cacat, terutama untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan kesejahteraan yang akan dicapainya.

Rehabilitasi Vokasional Sebagai Bentuk Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Pendidikan Nonformal Bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Fischler dalam Putra & Setiawati (2021), mengartikan rehabilitasi vokasional sebagai sekelompok pelayanan yang ditujukan kepada individu dengan kecacatan mental atau fisik, yang bertujuan agar individu tersebut dapat memperoleh keterampilan, meningkatkan sumber daya, mengoptimalkan sikap, serta harapan yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa rehabilitasi vokasional dilakukan dengan memberikan pelayanan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengolah, mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas fisik. Tujuannya agar mereka memiliki keterampilan vokasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta jangka panjangnya dapat menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat. Rehabilitasi Vokasional sebagai salah satu bentuk program dari Kementerian Sosial yang ditujukan untuk mempersiapkan penyandang disabilitas memasuki dunia kerja. Rehabilitasi ini sendiri merupakan suatu proses rehabilitasi secara berkesinambungan dan terpadu yang menyediakan pelayanan (bimbingan kerja, pelatihan kerja, dan penempatan kerja) untuk memungkinkan penyandang disabilitas memperoleh suatu pekerjaan yang tepat dan dapat mempertahankan pekerjaan tersebut.

Tahapan rehabilitasi vokasional sendiri terdiri dari: (1) Program Rehabilitasi Vokasional melakukan kegiatan terpadu dalam mempersiapkan penyandang disabilitas memasuki dunia usaha; (2) Penyandang disabilitas disatukan dalam satu lembaga pelatihan, dimana mereka akan dilatih keterampilan, skill dan attitude kerja yang baik; (3) Setelah melalui tahapan pelatihan, tahapan selanjutnya adalah pemagangan. Pemagangan dimaksudkan supaya penyandang disabilitas dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan berlatih menerapkan ketrampilan, skill dan attitude mereka di dunia kerja.

Melalui Program Pelatihan Vokasional ini diharapkan penyandang disabilitas dapat berperan serta dalam pembangunan nasional dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga masyarakat dan dunia kerja dapat menerima mereka dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas adalah kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama di mana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan. Penyandang disabilitas memiliki permasalahan tekanan dari lingkungan sosial kurangnya keikutsertaan dan pelibatan penyandang disabilitas terhadap berbagai macam kegiatan dengan kesempatan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada disekitar mereka. Masyarakat menganggap disabilitas sebagai abnormalitas dan dampaknya seringkali berujung pada anggapan bahwa kaum disabilitas adalah kaum abnormal dan obyek yang layak dikasihani, diberi donasi, serta tidak dapat mandiri. Selain itu pemberian kesempatan kerja masih belum diperoleh, kondisi penyandang disabilitas dianggap tidak cocok untuk bekerja karena pekerjaan yang dilakukan akan menghambat kondisi kedisabilitas mereka. Faktor lainnya pemberi kerja beranggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cocok bekerja di perusahaan mereka karena tidak memiliki keterampilan yang memadai dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Untuk itu pentingnya peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yaitu dengan

pendidikan kecakapan hidup. Rehabilitasi vokasional sebagai bentuk pendidikan kecakapan hidup melalui Pendidikan Nonformal bagi penyandang disabilitas fisik dilakukan dengan memberikan pelayanan berupa kegiatan pelatihan keterampilan yang bertujuan untuk mengolah, mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas agar mereka memiliki keterampilan vokasional sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian serta jangka panjangnya dapat menjadi bekal mereka dalam bermasyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, A. (2012). *Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill Education): Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bartin, T., & Wisroni, W. (2019). The Individual Characteristics and Business Potential of Participant on Life Skills Education Program (PKH) in PKBM. *Spektrum: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*2, 7(1). Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/pnfi/article/view/103662>
- Couser, G. T. (2009). *Signifying Bodies: Disability in Contemporary Life Writing (Corporealities: Discourses Of Disability)*. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press. Retrieved from https://www.sas.upenn.edu/~cavitch/pdf-library/Couser_Signifying_Bodies.pdf
- Creswell, J. W. (2010). *Desain dan Model Penelitian Kualitatif* (1st ed.). California: Sage.
- Depdiknas. (2002). *Pedoman Penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills) Melalui Pendekatan Broad Base Education (BBE) dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Dhairyya, A. P., & Herawati, E. (2019). Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung. *UMBARA: Indonesian Journal of Anthropology*, 4(1). Retrieved from <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara/article/download/19039/11044>
- Jalius, J., Sunarti, V., Azizah, Z., & Gusmanti, R. (2019). Implementation of Life Skills in Order to add Family Income and Contributions to Empowerment of Women. *KOLOKIUUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2). Retrieved from <http://kolokium.pjp.unp.ac.id/index.php/kolokium-pls/article/view/354>
- Mantra, I. B. (2008). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Noeng, M. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Noor, A. H. (2015). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) di Pondok Pesantren dalam Meningkatkan Kemandirian Santri. *EMPOWERMENT: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah*, 4(1). Retrieved from https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=frVoliEAAAAJ&citation_for_view=frVoliEAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Poerwandari, E. K. (2011). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: LPSP3 Psikologi UI.
- Putra, P., & Setiawati, Y. (2021). Rehabilitasi Vokasional pada Pasien Skizofrenia. *Journal of Indian Society of Toxicology*, 16(2). <https://doi.org/10.31736/2020v16i2/32-38>
- Rahman, F. (2008). Evaluasi Partisipatoris Terhadap Pelatihan Pendampingan Komunitas Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 13(1). Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/humaniora/article/view/5015>
- Rothman, S. (2003). The Changing Influence of Socioeconomic Status on Student Achievement: Recent Evidence from Australia. *Australian Council for Educational Research (ACER)*. Retrieved from https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=lsay_conference

- Shapiro, A. H. (2000). *Everybody Belongs: Changing Negative Attitudes Toward Classmates with Disabilities*. New York: Routledge Falmer.
- Stoll, S. K. (2011). Social Justice. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, 82(8).
<https://doi.org/10.1080/07303084.2011.10598675>
- Suparno, Y. M. (2009). *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Sutrisno, H. (2000). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syobah, S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2). Retrieved from <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/view/2057>
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Retrieved from <http://dispora.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/UU-Nomor-20-tahun-2003-ttg-sistem-pendidikan-nasional.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Retrieved from [https://jdih.bumn.go.id/baca/UU Nomor 19 Tahun 2011.pdf](https://jdih.bumn.go.id/baca/UU%20Nomor%2019%20Tahun%202011.pdf)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Retrieved from [https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU. No. 8 Th. 2016.pdf](https://pug-pupr.pu.go.id/_uploads/PP/UU.No.8.Th.2016.pdf)
- Wolfensberger, W. (1992). *A Brief Introduction to Social Role Valorization: A High-order Concept for Addressing the Plight of Societally Devalued People, and for Structuring Human Services* (3rd ed.). Syracuse, NY: Training Institute for Human Service Planning, Leadership & Change Agency (Syracuse University).
- Zein, A. O. S. (2017). Tinjauan Aksesibilitas pada Fasilitas Umum bagi Pengunjung dengan Alat Bantu Berjalan Studi Kasus Mall Bandung Indah Plaza. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 2(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/264486-tinjauan-aksesibilitas-pada-fasilitas-um-cef7182f.pdf>